



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 37 Pemalang, Jawa Tengah 52319
Telepon (0284) 321193, Website <https://dinsoskbpp.pemalangkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. MU'MINUN, M.M.**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PEMALANG**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ANOM WIDIYANTORO**

Jabatan : **BUPATI PEMALANG**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

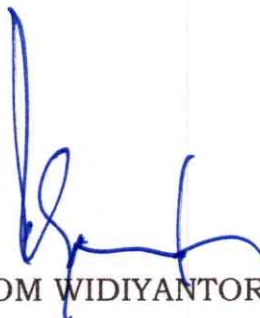
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 19 Januari 2026

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PEMALANG


ANOM WIDIYANTORO


Drs. MU'MINUN, M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PEMALANG

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2026	TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Meningkatnya kualitas penanganan Penyandang Pemerlu Kesejahteraan Sosial, Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase PPKS (penyandang pemerlu kesejahteraan sosial) yang ditangani	%	70	-	-	-	70
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,5	-	-	-	87,5
		LPP (laju Pertumbuhan Penduduk)	%	1,22	-	-	-	1,22
2.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial pada PPKS	Indeks pencapaian SPM Sosial	Indeks	100	-	-	-	100
		Persentase KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	-	-	-	100
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,11	-	-	-	2,11
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Angka	64,29-64,32	-	-	-	64,29-64,32
		IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Angka	65,90	-	-	-	65,90
4.	Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	IKG (indek ketimpangan gender)	Indeks	0,390	-	-	-	0,390
		Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	Nindya (780)	-	-	-	Nindya (780)
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,5	-	87,5	-	87,5
		Nilai SAKIP	Nilai	69,8	-	-	69,8	-

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	56.466.500,00	DAU
2.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.000.000,00	DAU
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	447.505.300,00	DAU
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	418.400.000,00	DAU
5.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	182.194.700,00	DAU
6.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	13.533.500,00	DAU
7.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.641.004.400,00	DAU
8.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	11.500.000,00	DAU+DAK
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	239.070.000,00	DAU
6.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	48.000.000,00	DAU
7.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	19.094.000,00	DAU
8.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	152.900.000,00	DAU+DAK
9.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	297.436.000,00	DAU+DAK
10.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	350.700.000,00	DAU+DAK
11.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.245.035.000,00	DAU+DAK
12.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.986.300.000,00	DAU
13.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	56.466.500,00	DAU
14.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.000.000,00	DAU
15.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	447.505.300,00	DAU
16.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	418.400.000,00	DAU
JUMLAH		23.110.139.400,00	

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG


ANOM WIDIYANTORO

Pemalang, 19 Januari 2026

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG


Drs. MU'MINUN, M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 37 Pemalang, Jawa Tengah 52319
Telepon (0284) 321193, Website <https://dinsoskbpp.pemalangkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPADI, AKS, M.H
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. MU'MINUN, M.M
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, Januari 2026
Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

SUPADI, AKS, M.H

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Jumlah	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	%	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang terpenuhi	%	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2	Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai regulasi	%	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	%	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	%	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5	Terlaksananya Fasilitasi Administratif Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	Persentase Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi	%	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00
6	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	%	100,00	0,00	100	0,00	0,00
7	Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
8	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	%	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239.097.900,00	0,00	212.038.500,00	26.929.400,00	130.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.528.648.100,00	1.097.027.999,00	2.691.731.036,00	1.101.601.199,00	638.287.866,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.756.000,00	13.856.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.997.675,00	146.335.500,00	62.662.175,00	5.700.000,00	300.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.000.000,00	10.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731.292.845,00	252.359.200,00	210.412.400,00	136.320.245,00	132.201.000,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	867.211.880,00	182.100.900,00	549.810.000,00	126.720.980,00	8.580.000,00
Total Anggaran		7.641.004.400,00	1.701.679.599,00	3.762.554.111,00	1.397.271.824,00	779.498.866,00

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, Januari 2026
Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


SUPADI, AKS, M.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERSISWATI NUR ALIFAH, SH.**
Jabatan : **Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUPADI, AKS, M.H.**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak


SUPADI, AKS, M.H

Pemalang, Januari 2026
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan


HERSISWATI NUR ALIFAH, SH.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN BINA PROGRAM DAN KEUANGAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	0	2	0	0
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	1	0
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	0	0	2	0
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	1	0	0
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	0	0	2	0
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	0	0	1	1
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	0	5	0	0
8	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	33	0	0	0	33
9	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	0	0	0	1

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
10	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	1	0	0
11	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	17	4	5	4	4

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	12.611.200,00	0,00	12.611.200,00	0,00	0,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.319.800,00	975.000,00	9.344.800,00	0,00	0,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.107.300,00	0,00	14.107.300,00	0,00	0,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	12.586.000,00	0,00	1.190.000,00	11.396.000,00	0,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.953.600,00	0,00	24.635.000,00	6.188.600,00	130.000,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.520.000,00	0,00	98.520.000,00	0,00	0,00
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.467.746.000,00	1.093.527.999,00	2.654.137.536,00	1.090.328.199,00	629.752.266,00
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.784.000,00	0,00	15.407.500,00	3.715.500,00	1.661.000,00
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.254.000,00	2.500.000,00	9.511.000,00	3.365.500,00	1.877.500,00
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22.864.100,00	1.000.000,00	12.675.000,00	4.192.000,00	4.997.100,00
TOTAL		5.767.746.000,00	1.098.002.999,00	2.912.139.336,00	1.119.185.799,00	638.417.866,00

Pihak Kedua,
 Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SUPADI, AKS, M.H

Pemalang, Januari 2026
 Pihak Pertama,
 Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

HERSISWATI NUR ALIFAH, SH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Umi Paridah, A.Md.Keb.,S.Tr.Keb**
Jabatan : **Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

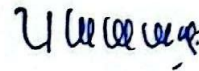
Nama : **SUPADI, AKS, M.H**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak


SUPADI, AKS, M.H

Pemalang, Januari 2026
Pihak Pertama,
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian



UMI PARIDAH, A.Md.Keb.,S.Tr.Keb

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

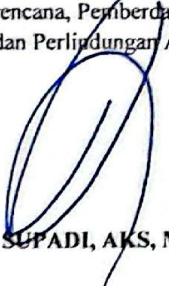
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	60	0	0	60
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	0	0	0
3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	0	0	0
4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	0	0	0
5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	0
6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	1	0	0
7	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	25	15	10	0	0
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	4	4	4	4
9	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	4	10	0	0

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
10	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8	2	2	0
11	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	3	2	4
12	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	0	0	0
13	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	0	0	1
14	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	0	0	0	5
15	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50	50	0	0	0
16	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	1	0	0	0
17	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0	1	0	1
18	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	3	0	0

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31.756.000,00	13.856.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.997.175,00	20.000.000,00	997.175,00	0,00	0,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.794.000,00	24.865.000,00	3.929.000,00	0,00	0,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.550.500,00	29.750.500,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.704.000,00	10.000.000,00	12.704.000,00	0,00	0,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.620.000,00	3.720.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.250.000,00	19.750.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.082.000,00	38.250.000,00	23.832.000,00	0,00	0,00
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000,00	10.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	91.093.445,00	54.650.000,00	25.468.000,00	10.975.445,00	0,00
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.101.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	25.601.000,00
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.940.000,00	19.940.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	462.158.400,00	140.269.200,00	117.444.400,00	97.844.800,00	106.600.000,00
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.821.880,00	54.100.900,00	40.000.000,00	46.720.980,00	10.000.000,00
16	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	TW I	TW II	TW III	TW IV
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114.810.000,00	45.000.000,00	39.810.000,00	30.000.000,00	0,00
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	578.580.000,00	60.000.000,00	460.000.000,00	50.000.000,00	8.580.000,00
TOTAL		1.873.258.400,00	604.651.600,00	837.584.575,00	276.641.225,00	154.381.000,00

Pihak Kedua,
 Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
 Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
 dan Perlindungan Anak


 SUPADI, A.K.S., M.H

Pemalang, Januari 2026
 Pihak Pertama
 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian



UMI PARIDAH, A.Md.Keb., S.Tr.Keb



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 37 Pemalang, Jawa Tengah 52319
Telepon (0284) 321193, Website <https://dinasokbpp.pemalangkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIYANTO, S.IP**
Jabatan : **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MU'MINUN, M.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak


Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, Januari 2026
Pihak Pertama,

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial


RIYANTO, S.IP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BIDANG REHABILITASI SOSIAL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya kualitas penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan sosial	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	Meningkatnya penangananan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7	7	0	0	0
4	Meningkatnya kualitas rehabsos bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Persentase PPKS di luar sasaran SPM yang terlayani	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5	Meningkatnya Fasilitas Akses Pelayanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	Persentase Fasilitas Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	75	0	75	0
7	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	0	0	0

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
8	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	18	18	0	0	0
9	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7	7	0	0	0
10	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70	70	0	0	0
11	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	104	0	0	104	0
12	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	8	0	0	0
13	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	8	0	0	0
14	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	0	3	0	2
15	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7	7	0	0	0
16	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	15	0	0	30
17	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	9	9	0	0	0

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
18	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	30	0	0	100,00
19	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	15	0	0	56
20	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	40	40	0	0	0
21	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya BUKAN Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial yang di Rehabilitasi	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
22	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	25	0	0	0
23	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	3	0	0	0
24	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	0	0	0
25	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	12	0	0	0
26	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Aduan	8	8	0	0	0

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
27	Meningkatnya kualitas penangananan korban bencana pada pasca bencana	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
28	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Pesentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terfasilitasi	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
29	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	225	225	0	0	0
30	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	225	225	0	0	0
31	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	35	35	0	0	0
32	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	3	0	0	0
33	Meningkatnya Kapasitas SDM Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
34	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1	1	0	0	0

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
35	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	40	0	0	0
36	Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	40	40	0	0	0
37	Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/ Kelurahan	1	1	0	0	0
38	Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	40	40	0	0	0
39	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Dokumen	1	1	0	0	0
40	Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang	60	60	0	0	0

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyediaan Permakanan	15.950.000,00	7.700.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00
3	Penyediaan Sandang	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Penyediaan Alat Bantu	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	200.409.000,00	159.000,00	0,00	200.250.000,00	0,00
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Pemberian Layanan Data dan Pangaduan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	40.930.000,00	13.030.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
11	Pemberian Layanan Rujukan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	2.499.800,00	2.499.800,00	0,00	0,00	0,00
13	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	2.252.500,00	2.252.500,00	0,00	0,00	0,00

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
15	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	5.057.000,00	5.057.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Pemberian Layanan Rujukan	3.865.000,00	3.865.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	24.112.000,00	24.112.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Penyediaan Makanan	51.450.000,00	51.450.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Penyediaan Sandang	98.550.000,00	98.550.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
28	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	1.470.700,00	1.470.700,00	0,00	0,00	0,00
30	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	3.624.000,00	3.624.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Anggaran		630.700.000,00	394.300.000,00	9.300.000,00	217.800.000,00	9.300.000,00

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak


Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, Januari 2026
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial


RIYANTO, S.IP



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUSTINA DWI MEININGTIAS, SKM, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MU'MINUN, M.M
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, Januari 2026
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan
dan Jaminan Sosial

YUSTINA DWI MEININGTIAS, SKM, M.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya kualitas PSKS dalam pemberdayaan PPKS	Persentase PSKS yang dibina	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2	Meningkatnya Kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya	Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang meningkat kapasitas/potensinya	%	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	20	20	0	0	0
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	Lembaga	3	3	0	0	0
5	Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	10	0	0	0	10
6	Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	10	0	0	10	0
7	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	0	10	0	0
8	Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Lembaga	10	0	10	0	0
9	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	15	15	0	0	0
10	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang (1 KUBE 10 orang)	5	5	0	0	0

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
11	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan	10	0	10	0	0
12	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	orang	2	0	1	1	0
	Meningkatnya kualitas perlindungan dan pemberian jaminan sosial	Persentase daerah (kel/desa) yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Persentase anak telantar dan fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13	Meningkatnya Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Anak Terlantar yang Terdaftar di DTKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	orang	120	0,00	0,00	0,00	120
14	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	0	0	0
15	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	0	0	0
16	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	150	0	0	0
17	Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Orang	5	5	0	0	0
18	Terlaksananya Updating Data Fakir miskin	Terupdatenya Data Fakir miskin	Dokumen	3	3	3	3	3
19	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	10000	200	5000	4800	0
20	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	0	2	6	0
21	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	10	10	0	0	0
22	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	10000	9500	0	500	0

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
23	Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Orang	3	0	3	0	0
24	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25	Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	1	0	0
27	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	0	0	0	1
28	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	0	0	0
29	Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Orang	1	0	0	0	1
30	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Orang	5	0	0	5	0

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.292.000,00	3.292.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8.764.000,00	8.764.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
6	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00	0,00	0,00
7	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	0,00
10	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	32.397.000,00	9.897.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
11	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
12	Rujukan Anak-Anak Terlantar	5.196.500,00	5.196.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	42.295.000,00	42.295.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	11.221.000,00	11.221.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	250.772.000,00	6.656.500,00	99.260.500,00	144.855.000,00	0,00
16	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	56.500.000,00	9.300.000,00	41.200.000,00	6.000.000,00	0,00
17	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.304.000,00	2.304.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	16.205.500,00	15.545.500,00	660.000,00	0,00	0,00
19	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	31.206.000,00	10.656.000,00	20.550.000,00	0,00	0,00
20	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5.880.000,00	0,00	0,00	5.880.000,00	0,00
21	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6.603.000,00	0,00	0,00	0,00	6.603.000,00
22	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
23	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
24	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Total Anggaran		488.400.000,00	133.508.000,00	173.634.000,00	165.755.000,00	15.503.000,00

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, Januari 2026
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

YUSTINA DWI MEININGTIAS, SKM., M.Kes



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRIYATNO YULIHARSO, S.IP, M.P**
Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MU'MINUN, M.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, Januari 2026
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

TRIYATNO YULIHARSO, S.IP, M.P

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya kuitass PUG dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	4,30	0,00	0,00	0,00	4,30
2	Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Persentase OPD yang melaksanakan pengarusutamaan gender	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	1	0	0
4	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	1	0	1	0	0
5	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Kebijakan	1	1	0	0	0
6	Terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	41	0	0	0	41
7	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	1	0	0
8	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	50	1	0	0	50
9	Terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	41	0	50	0	41
10	Meningkatnya Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	%	0,072	0,00	0,00	0,00	0,072

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
11	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	36	0	0	0	36
12	Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	Lembaga	36	0	0	0	36
13	Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	36	0	0	0	36
14	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	1	0	0	0	1
15	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	orang	50	0	0	0	50
16	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	50	0	0	0	50
17	Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	%	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
18	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	35	0	35	0	0

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
19	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	dokumen	1	0	0	1	0
20	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	1	0	0	1	0
21	Terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	orang	50	0	0	0	50
22	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	25	0	0	0	25
23	Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
24	Meningkatnya upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	%	7,30	0,00	0,00	0,00	7,30
25	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	1	0	0	1	0
26	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	1	1	0
27	Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	orang	15	0	0	0	15
28	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	30	0	0	1	30

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
29	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kebijakan	1	0	0	1	0
30	Meningkatnya upaya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilaporkan dan mendapat layanan komprehensif	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31	Meningkatnya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	10	0	0	0	10
33	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Laporan	1	0	1	0	0
34	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	Orang	15	0	0	0	15
35	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	orang	30	0	0	0	30
36	Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	1	0	1	0	0
37	Meningkatnya kualitas pelayanan keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	%	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
38	Meningkatnya lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Persentase lembaga penyedia layanan kualitas keluarga yang dibina dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
39	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	1	0	1	0	0
40	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kebijakan	1	0	1	0	0
41	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	0	0	0	20
42	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Dokumen	1	0	0	0	1
43	Meningkatnya lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Persentase lembaga penyedia layanan keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	1
45	Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	14	0	0	0	14

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
46	Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	14	0	0	0	14
47	Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga	14	0	0	0	14
48	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	14	0	0	0	14
49	Meningkatnya penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Persentase penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
50	Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	25	0	0	0	25
51	Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	25	0	0	0	25
52	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	25	0	0	0	25
53	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	25	0	0	0	25
54	Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	25	0	0	0	25
55	Meningkatnya kualitas data pilah gender	% OPD yang memiliki data gender	%	92,59	0,00	0,00	0,00	92,59
56	Meningkatnya OPD yang memiliki data gender dan anak	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak	%	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
57	Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	0	0	0	1

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
58	Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	Lembaga	35	0	0	0	35
59	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak melalui Kabupaten Layak Anak	Persentase pencapaian Desa/Kelurahan Layak Anak	%	48,87	0,00	0,00	0,00	48,87
60	Meningkatnya lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelebagaan PHA	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang aktif dalam pelebagaan PHA	%	82,95	0,00	0,00	0,00	82,95
61	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	25	0	0	0	25
62	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	0	0	0	25
63	Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	25	0	0	0	25
64	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	0	0	1
65	Meningkatnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan	%	67,26	0,00	0,00	0,00	67,26
66	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	50	0	0	0	50

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
67	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	1
68	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	5	0	0	0	5
69	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	0	0	1
70	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	50	0	0	0	50
71	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72	Meningkatnya lembaga perlindungan khusus anak yang di bina	Persentase lembaga perlindungan khusus anak yang di bina	%	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
73	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	0	0	0	1
74	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	1	0	0	0	1
75	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Laporan	1	0	0	0	1
76	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Dokumen	1	0	0	0	1
77	Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Orang	50	0	0	0	50

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
78	Terlaksananya Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	Kebijakan	1	0	0	0	1
79	Meningkatnya fasilitasi anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif	Persentase anak korban kekerasan termasuk TPPO yang melapor dan mendapat layanan komprehensif	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dikuatkan dan dikembangkan	%	83,33	0,00	0,00	0,00	83,33
81	Terlaksananya Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Perlindungan Khusus Anak	Dokumen	1	0	0	0	1
82	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	0	0	0	1
83	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	0	0	1
84	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	1	0	0	0	1
85	terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	1

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
86	terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	50	0	0	0	50
87	terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	2	0	0	0	2

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendampingan Penyelenggaraan PUG	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
8	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
9	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
10	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
13	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
14	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
15	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
16	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
17	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
18	Mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
19	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
20	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	72.850.000,00	0,00	72.850.000,00	0,00	0,00
21	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	69.360.000,00	0,00	0,00	69.360.000,00	0,00
22	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
23	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
24	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
25	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
26	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
27	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
28	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
29	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
30	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33	Monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
35	Penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
36	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
37	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
38	Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
39	Layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
40	Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
42	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
43	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
44	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
45	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
46	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
47	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
48	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
49	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
50	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	0,00	0,00
55	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
56	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	29.150.000,00	0,00	0,00	29.150.000,00	0,00


No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
58	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
59	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
60	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
62	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
63	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
64	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
65	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
66	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
	Total Anggaran	506.360.000,00	235.350.000,00	106.150.000,00	161.360.000,00	3.500.000,00

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, Januari 2026
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


TRİYATNO YULIHARSO, S.IP., M.P



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 37 Pemalang, Jawa Tengah 52319
Telepon (0284) 321193, Website <https://dinsoskbpp.pemalangkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta erorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DINI MURBARANI, S.Psi**
Jabatan : **Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MU'MINUN, M.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, Januari 2026
Pihak Pertama,
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
Perlindungan Anak

DINI MURBARANI, S.Psi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	Orang	7	0	0	0	7
2	Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	4	0	0	0	4
3	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	orang	24	0	0	0	24
4	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	35	0	0	0	35
5	Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	orang	26	0	0	0	26
6	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	35	0	0	0	35
7	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	60	0	0	0	60
8	Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Dokumen	1	0	0	0	1

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
9	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	52	0	0	0	52
10	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	45	0	0	0	45
11	Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	50	0	0	0	50
12	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	3	0	0	0	3
13	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	4	0	0	0	4
14	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	60	0	0	0	60
15	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	8	0	0	0	8
16	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	50	0	0	0	50

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	3.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	36.000.000,00	7.500.000,00	12.000.000,00	10.500.000,00	6.000.000,00
4	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	1.350.000,00	350.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00
5	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	9.100.000,00	2.100.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.100.000,00
6	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	14.110.000,00	3.700.000,00	3.910.000,00	4.280.000,00	2.220.000,00
7	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	21.000.000,00	1.500.000,00	16.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	11.094.000,00	3.636.000,00	3.590.000,00	3.868.000,00	0,00
9	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	22.886.000,00	7.286.000,00	5.770.000,00	6.130.000,00	3.700.000,00
10	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	67.500.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00	22.500.000,00	9.000.000,00

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
11	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	18.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.200.000,00
12	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	9.300.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
13	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.400.000,00	800.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
14	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
15	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	4.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00
16	Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	22.500.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	4.500.000,00
Total Anggaran		261.640.000,00	59.872.000,00	89.470.000,00	74.278.000,00	38.020.000,00

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, Januari 2026
Pihak Pertama,
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan


DINI MURBARANI, S.Psi



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 37 Pemalang, Jawa Tengah 52319
Telepon (0284) 321193, Website <https://dinsoskbpp.pemalangkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IVONNE PUSPARINI MEKARSARI**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MU'MINUN, M.M**
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, Januari 2026
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

IVONNE PUSPARINI MEKARSARI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50
2	Persentase pemetaan dan pengelolaan data pengendalian penduduk, yang mencakup pencatatan, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data secara menyeluruh di wilayah kabupaten/kota	Persentase kelembagaan dalam pengendalian penduduk yang aktif (Kampung KB dan SSK)	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data keluarga dan pembinaan/pengawasan serta pelaporan KKBP	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Dokumen	1	0	0	0	1
5	Meningkatnya kualitas pembinaan keluarga berencana	Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR	%	70,85	0,00	0,00	0,00	70,85
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,58	0,00	0,00	0,00	9,58
6	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PUS yang mendapat pelayanan KB	%	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50
7	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	0	0	0	1
8	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	14	0	5	0	14
9	Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan keluarga sejahtera	Persentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Tribina aktif	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	0	0	1	0
12	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	597	47	400	75	75
13	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	4	2	0	0	2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
14	Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Keselamatan Keluarga	Persentase organisasi kemasyarakatan peduli Keluarga Beresiko Stunting	%	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	1	0	0	0	1
16	Terlaksananya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Laporan	1	0	0	0	1

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	350.700.000,00	200.000,00	140.675.000,00	139.825.000,00	70.000.000,00
2	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
3	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5.215.035.000,00	1.423.035.000,00	1.422.000.000,00	1.422.000.000,00	948.000.000,00
4	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	266.500.000,00	16.650.000,00	149.950.000,00	49.950.000,00	49.950.000,00
6	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	15.000.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00
7	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	7.484.400.000,00	1.496.880.000,00	2.245.320.000,00	2.245.320.000,00	1.496.880.000,00
8	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	160.400.000,00	7.000.000,00	70.200.000,00	76.400.000,00	6.800.000,00
Total Anggaran		13.582.035.000,00	2.946.765.000,00	4.062.645.000,00	3.937.995.000,00	2.634.630.000,00

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Drs. MU'MINUN, M.M

Pemalang, Januari 2026
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

IVONNE PUSPARINI MEKARSARI